BAB 6

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan utama yang terjadi di daerah. Pemaparan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS			
1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat	1) Pengembangan Demokrasi di Daerah
			2) Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
	2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)
			2) Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLB, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
			3) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4) Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa KALTIM TUNTAS
			5) Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
			6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh
			7) Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa
			8) Penguatan kapasitas kelembagaan tentang anak
			9) Pengembangan perpustakaan digital
			10) Pemenuhan Bahan Bacaan Perpustakaan
	3. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)
			2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit
			3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			4) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	1) Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat
			2) Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
			3) Peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha
	5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang	Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas	1) Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	disabilitas	berwirausaha	2) Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas
	6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1) Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
MISI 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	7. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Optimalisasi pengelolaan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis
			2) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan
			3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggukan kompetitif UKM
			4) Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda dengan Penumbuhan Usaha Rintisan (*Startup*)Industri Kreatif
			5) Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi untuk perempuan dan keluarga
			6) Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi dan keunggulan daerah
	8. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan secara merata	1) Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
			2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa
			3) Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas
			4) Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata	1) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat
			2) Pemanfaatan Anjungan Kaltim di TMII sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata Kaltim
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	10. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	1) Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan
			2) Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas
			3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor
	11. Meningkatnya realisasi investasi	Percepatan proses perizinan dan pengendalian rencana investasi	1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi
			2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi
	12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering
			2) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
			3) Perbaikan penanganan pasca penen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura
			4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani
			5). Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian
	13. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui pola kemitraan	1) Pembangunan Miniranch sapi
			2) Penyediaan Informasi Peternakan
			3) Fasilitasi Penyediaan Permodalan bagi Peternak
			1) Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak
	14. Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1) Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan
			2) Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan
			3) Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir
			4) Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
			5) Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi
			6) Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa Perkebunan
			7) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan
	15. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1) Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan
			2) Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan
			3) Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan
	16. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	1) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan
			2) Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan
			3) Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi
			4) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
	17. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1) Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3 : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN			
5. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	18. Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayaran
			2) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
			3) Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat
	19. Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan	1) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan
			2) Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi (hinterland) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah
			3) Peningkatan aksesibilitas ke kawasan strategis pariwisata nasional dan provinsi
	20. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih	1) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku
			2) Peningkatan infrastruktur layanan air minum
	21. Menurunnya kawasan kumuh	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	1) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi keluarga pra sejahtera pada kawasan kumuh
			2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat
	22. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1) Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
MISI 4 : BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN			
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	23. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	24. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
	25. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
MISI 5 : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK			
7. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1) Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
			2) Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
			2) Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
	28. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel		1) Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah
			2) Meningkatnya kapabilitas APIP
	27. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan efisiensi di berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/ teknologi informasi	1) Peningkatan tatakelola pemerintah yang baik
			2) Peningkatan kualitas komunikasi dan teknologi informasi

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai **prioritas pembangunan** *(strategy focused organization)* lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah

3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi.
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan tahunan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tematik pembangunan setiap tahun diprioritaskan, dengan mengacu pada pelaksanaan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 6.2 Arah Tematik Tahunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Arahan Tematik Tahunan
2019	Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri
2020	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi
2021	Menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan
2022	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas pasar komoditas
2023	Penguatan pasar produk-produk unggulan untuk menampung hasil produksi Kalimantan Timur

Gambar 6.1
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, RKPD Tahun 2019-2023

6.3 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (*Dedicated Program*)

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Pengembangan nilai -nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama.
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA

7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat

30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

6.4 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan

1. Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2019-2023) mendatang diarahkan untuk mendukung: (1) penguatan konektifitas antar kawasan ekonomi dan pemerataan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu di seluruh wilayah; (2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah ; (3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Tabel 6. 3

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1	**PASER**	Peningkatan Produktifitas pertanian pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif pada areal konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui pola kemitraan
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan rakyat (kopi, aren, sagu, kelapa, kakao, sawit)
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan Air Bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengendalian kawasan budidaya perikanan pada kawasan cagar alam teluk adang teluk apar
		Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
		Pengembagan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan
2.	**KUTAI BARAT**	Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan karet rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian
		Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi Kresik Luway dan kawasan eks galian tambang
		Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
		Pengembagan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan
3.	**KUTAI KARTANEGARA**	Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang dan kawasan lindung
		Peningkatan Produktifitas pertanian pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif pada areal konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui pola kemitraan

NO.	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
		Pengembagan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Pengembangan industri Pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan wisata budaya
4.	**KUTAI TIMUR**	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan industri Maloy	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang dan kawasan lindung
5.	**BERAU**	Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang dan kawasan lindung
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Pengembangan industri Pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan ekowisata

NO.	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
		Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
6.	**PENAJAM PU**	Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Pengembangan Agroindustri	Pengembangan kawasan industri Buluminung sebagai pusat industri pengolahan produk pertanian
7.	**MAHAKAM ULU**	Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi dan akses ke ibukota kabupaten	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi, jalan menuju ibukota kabupaten
		Pengembagan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan
8.	**BALIKPAPAN**	Pengembangan industri Pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan wisata buatan
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan kawasan industri kariangau sebagai kawasan industri pengolahan multi produk
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan sentra produksi ke kawasan industri kariangau
			Peningkatan Upaya pengendalian banjir
			Pengembangan Direct Call Pelabuhan Kariangau
			Peningkatan pelayanan air bersih

NO.	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
9.	**SAMARINDA**	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan Bandara APT Pranoto ke kawasan lainnya
			Peningkatan Upaya pengendalian banjir
			Peningkatan pelayanan air bersih
		Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang
		Pengendalian perluasan kawasan pertambangan	Pembatasan wilayah kerja konsesi pertambangan pada kawasan permukiman
10.	**BONTANG**	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Peningkatan Upaya pengendalian banjir
			Peningkatan pelayanan air bersih
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk Perikanan
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil perikanan

2. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memerhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *missleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-kluster-an wilayah mempunyai pengaruh

penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur 2016-2036, dan berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan prioritas pengembangan kawasan untuk lima tahun kedepan pada Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur, dan Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Tabel 6. 4
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi

No.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1.	Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan)	Pengembangan Aneka Industri dan Agroindustri yang terintegrasi	Percepatan realisasi investasi industry pengolahan, pengembangan direct call terminal pelabuhan peti kemas, dan percepatan penyelesaian jaringan infrastruktur antar kawasan sekitarnya.
2.	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan pusat/sentra pengolahan *oleo chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier)	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan kelapa sawit, *oleo chemical*, dan industri turunannya.
3.	Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat	Peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sekitarnya	Pengembangan Ekowisata, peningkatan nilai tambah produk Perikanan, pengendalian banjir

6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif

Pencapaian indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pembanguna*n Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			MISI 1: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas															
			Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing															
			Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	**Indeks Demokrasi Indonesia**	**72.86**	**73.5**		**74.5**		**75.5**		**76.5**		**77.5**		**77.5**		
1	5	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	67,18	68	2,492,300,000	69	1,000,000,000	70	1,075,000,000	71	1,140,000,000	72	1,260,000,000	72	6,967,300,000	Kesbangpol
1	1	41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB)	72	90	10,000,000,000	150	10,000,000,000	233	10,000,000,000	233	10,000,000,000	233	10,000,000,000	233	50,000,000,000	Disdikbud
2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal	17	90	1,097,268,226	150	9,200,000,000	233	9,200,000,000	233	11,763,300,000	233	17,028,200,000	233	48,288,768,226	Disdikbud

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sasaran 2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	**Rata-rata lama sekolah (Tahun)**	**9,36**	**9,40**		**9,50**		**9,60**		**9,70**		**9,80**		**9,80**		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	**13,49**	**13,89**		**14,13**		**14,34**		**14,73**		**14,96**		**14,96**		
1	1	42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	0	0	0	55	20,000,000,000.00	70	20,000,000,000.00	86	20,000,000,000.00	86	20,000,000,000.00	86	80,000,000,000	Disdikbud
1	1	39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	68,23	69%	117,863,785,000	72.00%	136,940,000,000	76.00%	154,660,020,000	78.00%	163,543,900,000	80.00%	169,254,000,000	85	742,261,705,000	Disdikbud
1	1	39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	68,23	69%	72,532,337,000	72.00%	108,093,000,000	76.00%	224,257,023,420	78.00%	362,235,297,400	80.00%	447,616,363,500	85	1,214,734,021,320	Disdikbud
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	95	96.00%	6,828,750,000	98.00%	14,770,000,000	99.00%	28,340,000,000	100.00%	30,349,000,000	100.00%	37,728,000,000	100	118,015,750,000	Disdikbud

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	1	23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang)	791	6500	80,016,703,000.00	13000	93,570,000,000.00	19500	100,000,000,000.00	26000	110,000,000,000.00	31709	121,000,000,000	31709	504,586,703,000	Disdikbud
1	1	38	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	635	2500	11,750,025,875	2500	77,943,407,000	2500	53,718,361,600	2500	57,855,561,600	2500	30,180,000,000	2500	231,447,356,075	Disdikbud
1	2	107	Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	0	85.00%	0	90.00%	20,000,000,000.00	95.00%	20,000,000,000.00	97.00%	20,000,000,000.00	100.00%	20,000,000,000.00	100	80,000,000,000	Disdikbud
1	1	19	Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	60	65	8,060,811,000	70	23,793,195,800	75	24,356,000,000	80	40,689,400,000	85	45,090,000,000	85	141,989,406,800	Disdikbud

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	2	21	Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	76.00%	223,985,000	82.00%	-	88.00%	-	94.00%	-	100%	-	100	223,985,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak
2	#	23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	2,447	3,662	796,500,000	4,559	1,000,000,000	5,771	1,125,000,000	6,393	1,200,000,000	70,323	1,500,000,000	70,323	5,621,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Sasaran 3 : Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	**Usia Harapan Hidup (Tahun)**	**73,7**	**73,72**		**73,74**		**73,76**		**73,78**		**73,80**		**73,80**		
1	2	56	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50	60	1,441,700,240	70	653,350,000	80	1,453,350,000	90	1,822,938,500	100	2,017,995,000	100	7,389,333,740	Dinas Kesehatan
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	6	15	2,385,297,500	43	2,500,000,000	64	3,000,000,000	96	5,412,331,760	100	4,570,710,000	100	15,668,339,260	Dinas Kesehatan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	87.5	87.5	41,478,068,000	90	41,500,000,000	92	41,500,000,000	95	41,000,000,000	100	41,500,000,000	100	206,978,068,000	Dinas Kesehatan
			Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat															
			Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**56,64**	**56.7**		**56.71**		**56.72**		**56.73**		**56.75**		**56.75**		
2	2	20	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	34	37	158,900,000	40	650,000,000	43	150,000,000	46	160,000,000	47	160,000,000	47	1,278,900,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak
2	2	35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0,066	0,060	-	0,054	200,000,000	0,048	250,000,000	0,042	300,000,000	0,038	350,000,000	0,038	1,100,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	6	23	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)	300	1000	1,380,185,000	1500	1,375,203,500	2500	1,518,203,500	3000	1,518,203,500	3500	1,518,203,500	3500	7,309,999,000	Dinas Sosial
1	06	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)	0	32	212,200,000	431	233,420,000	45	233,420,000	461	233,420,000	475	233,420,000	475	1,145,880,000	Dinas Sosial
			Sasaran 5 : Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	**Indeks Pembangunan Pemuda**	**56,33**	**56,74**		**57,23**		**57,82**		**58,27**		**58,86**		**58,86**		
2	13	33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	0.36%	24.15%	3,911,650,000	35.00%	3,500,000,000	40.00%	5,210,000,000	55.00%	7,225,000,000	60.00%	7,830,542,000	60.00%	27,677,192,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	35	Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	0,03	0,09	-	0,15	1,478,200,000	1	2,500,000,000	1,5	3,000,000,000	2	5,000,000,000	2	11,978,200,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)**	**50**	**51**		**52**		**53**		**54**		**55**		**55**		
2	1	15	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80.00%	80.00%	6,957,500,000	80.00%	8,007,500,000	80.00%	7,007,500,000	80.00%	7,357,875,000	80.00%	7,357,875,000	80.00%	36,688,250,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Misi 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN															
			Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan															
			Sasaran 7 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	**Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB (%)**	**-**	**4,40**		**4,50**		**4,60**		**4,70**		**4,80**		**4,80**		
2	11	20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas	0	0	-	100 Koperasi	3,424,608,000	100 Koperasi	3,733,608,000	100 Koperasi	4,033,608,000	100 Koperasi	4,333,608,000	400 Koperasi	15,525,432,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Jumlah UKM Naik Kelas	0	0		200 UKM		200 UKM		200 UKM		200 UKM		800 UKM		
				Jumlah Koperasi Sehat	0	0		100 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		400 Koperasi		
			Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	**Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)**	**518**	**503**		**478**		**448**		**413**		**368**		**368**		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	7	16	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	302	20	148,045,000	25	670,000,000	30	700,000,000	35	720,000,000	40	714,000,000	40	2,952,045,000	DPMPD
2	7	29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	289	20	300,000,000	25	1,000,000,000	30	1,080,000,000	35	1,130,000,000	40	1,125,000,000	40	4,635,000,000	DPMPD
2	7	28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	63	73	475,000,000	103	1,150,000,000	138	1,242,000,000	173	1,280,000,000	213	1,295,000,000	213	5,442,000,000	DPMPD
2	7	30	Program Kampung Iklim +	Jumlah kampung/desa (Desa)	28	20		22	2,000,000,000	25	1,250,000,000	27	1,500,000,000	28	1,650,000,000	28	6,400,000,000	DPMPD
			Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)**	**0.93**	**0.95**		**0.97**		**0.99**		**1.01**		**1.03**		**1.03**		
3	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2 Kawasan	2 Kawasan	1,885,600,000	2 Kawasan	2,800,000,000	2 Kawasan	3,050,000,000	2 Kawasan	3,050,000,000	2 Kawasan	3,050,000,000	2 Kawasan	13,835,600,000	Dinas Pariwisata

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan															
			Sasaran 10 : Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	**Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)**	**18,33**	**20**		**20**		**20**		**21**		**21**		**21**		
3	7	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	0,23	1	2,529,800,000	1	4,080,000,000	1	4,692,000,000	1	5,395,810,000	1,5	6,205,170,000	1,5	22,902,780,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Sasaran 11 : Meningkatnya realisasi investasi	**Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)**	**25,53**	**31,5**		**33,08**		**34,73**		**36,47**		**38,29**		**38,29**		
2	12	18	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	15	14	221,000,000	13	1,500,000,000	12	1,520,000,000	11	1,600,000,000	10	1,600,000,000	10	6,441,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri di Kariangau (perusahaan)	0	25	509,400,000	25	1,590,000,000	25	2,000,000,000	25	2,250,000,000	25	2,570,000,000	25	8,919,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sasaran 12 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	**Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)**	**0.52**	**0.53**		**0.54**		**0.55**		**0.56**		**0.57**		**0.57**		
				Rasio Pemenuhan Beras (%)	**57,91**	**75,43**		**77,62**		**79,94**		**82,02**		**85,16**		**85,16**		
3	3	51	Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi padi (Ton)	383,958	403,000	11,471,580,000	423,000	13,550,000,000	444,000	13,550,000,000	466,000	15,150,000,000	495,000	14,550,000,000	495,000	68,271,580,000	DPTPH
3	3	41	Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	226,017	233,020	3,020,600,000	240,245	3,700,000,000	247,698	3,700,000,000	255,387	3,950,000,000	263,320	3,700,000,000	263,320	18,070,600,000	DPTPH
			Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	**Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)**	**0.3**	**0.33**		**0.34**		**0.35**		**0.36**		**0.37**		**0.37**		
3	3	34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	0	5	5,800,000,000	35	10,250,000,000	40	11,670,000,000	35	7,400,000,000	35	7,600,000,000	150	42,720,000,000	Dinas Peternakan
3	3	90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	19	20	7,000,000,000	20	24,100,000,000	20.5	7,100,000,000	21	7,700,000,000	22	8,300,000,000	22	54,200,000,000	Dinas Peternakan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sasaran 14 : Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	**Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)**	**4.49**	**5.1**		**5.4**		**5.7**		**6**		**6.3**		**6.3**		
3	3	58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	13,249,959	15288465 Ton	14,977,395,000	16812938 Ton	21,805,111,250	17136849 Ton	16,717,791,000	18126358 Ton	16,717,791,000	18313874 Ton	18,472,673,000	18313874 Ton	88,690,761,250	Dinas Perkebunan
3	3	80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	98	35	542,400,000	35	1,010,821,250	35	1,010,821,000	35	1,150,000,000	35	1,537,331,000	140	5,251,373,250	Dinas Perkebunan
3	3	93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	0	2	0	2	2,251,383,750	2	2,251,383,000	3	2,400,000,000	3	3,424,072,000	10	10,326,838,750	Dinas Perkebunan
3	3	76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton C02eq)	1,87	4,79	275,800,000	4,08	977,500,000	4,07	977,500,000	4,06	1,020,000,000	4,04	1,490,000,000	4,04	4,740,800,000	Dinas Perkebunan
			Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	**Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)**	**1,46**	**1,52**		**1,58**		**1,64**		**1,71**		**1,78**		**1,78**		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	1	25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	151.918 Ton	154.956 Ton	4,125,830,000	158.055 Ton	5,555,000,000	161.216 Ton	6,110,500,000	164.441 Ton	6,721,550,000	167.730 Ton	6,721,550,000.00	167.730 Ton	29,234,430,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	1	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	149.039 Ton	152.027 Ton	15,396,907,000	155.516 Ton	18,157,500,000.00	158 938 Ton	16,121,500,000.00	162.593 Ton	13,093,650,000.00	166.170 Ton	11,279,213,620.00	166.170 Ton	74,048,770,620	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	1	29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2,5 Miliar Ekor	2,6 Miliar Ekor	3,796,810,000	2,7 Miliar Ekor	4,799,100,000	2,8 Miliar Ekor	5,111,750,000	2,9 Miliar Ekor	5,510,425,000	3 Miliar Ekor	4,789,100,000	3 Miliar Ekor	24,007,185,000	Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD. Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)
3	1	26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditatanuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	0 Kawasan	1 Kawasan	3,122,885,000	1 Kawasan	3,795,000,000	1 Kawasan	4,174,500,000	1 Kawasan	4,591,950,000	1 Kawasan	4,591,950,000	1 Kawasan	20,276,285,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Sasaran 16 : Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	**Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)**	**1,15**	**1**		**1.05**		**1.1**		**1.15**		**1.2**		**1.2**		
3	4	16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNBP sektor kehutanan (Rp. Miliar)	167	160	3,471,960,000.00	165	3,471,960,000.00	170	3,471,960,000.00	175	3,471,960,000.00	180	3,471,960,000.00	180	17,359,800,000	Dinas Kehutanan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	4	41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤2	≤2	782,100,000.00	≤1,75	782,100,000.00	≤1,5	782,100,000.00	≤1,25	782,100,000.00	≤1	782,100,000.00	≤1	3,910,500,000	Dinas Kehutanan
3	4	39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	218	1398	1,194,850,000.00	1398	1,194,850,000.00	1398	1,194,850,000.00	1398	1,194,850,000.00	1398	1,194,850,000.00	1398	5,974,250,000	Dinas Kehutanan
3	4	42	Program Penyuluhan, pemberayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	118,000	32,000	2,330,970,000.00	32,000	2,330,970,000.00	32,000	2,330,970,000.00	32,000	2,330,970,000.00	32,000	2,330,970,000.00	32,000	11,654,850,000	Dinas Kehutanan
			Sasaran 17 : Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	**Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)**	**-8.16**	**3.84**		**3.84**		**3.84**		**3.84**		**3.84**		**3.84**		
4	4	30	Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	0	-	-	4	3,946,999,000	6	4,341,700,000	8	4,775,871,000	10	5,046,127,000	10	18,110,697,000	Badan Pendapatan Daerah
			Misi 3 ; BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN															
			Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar															
			Sasaran 18 : Meningkatnya aksesibilitas wilayah	**Jumlah penumpang yang terlayani (orang)**	**10.392.536**	**10.705.000**		**11.026.000**		**11.536.200**		**11.700.000**		**12.050.000**		**12.050.000**		
				Jumlah barang (ton)	**325.051.663**	**334.805.000**		**344.850.000**		**355.200.000**		**365.900.000**		**376.900.000**		**376.900.000**		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	9	19	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	3,037,846,500	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (85%)	30,200,000,000	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)	40,609,330,000	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90%)	27,909,330,000	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90,42%)	27,909,330,000	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90,42%)	129,665,836,500	Dinas Perhubungan
2	9	15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	854	683	4,375,614,000	598	21,800,000,000	512	39,790,670,000	427	29,590,670,000	342	29,590,670,000	342	125,147,624,000	Dinas Perhubungan
			Sasaran 19 : Meningkatnya konektivitas antar kawasan	**Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)**	**2**	**2**		**3**		**3**		**3**		**6**		**6**		
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	52,85	54,30	552,481,103,020	58,88	994,570,504,517	63,46	1,329,828,399,770	68,04	2,029,191,334,197	72,62	2,661,831,219,624	72,62	7,567,902,561,128	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
			Sasaran 20 : Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	**Cakupan layanan air minum (%)**	**71,83**	**73,33**		**75**		**77**		**81**		**85**		**85**		
				Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	**13.618,5**	**14.008,5**		**14.808,5**		**15.558,5**		**16.258,5**		**16.925,5**		**16.925,5**		
				Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	**730**	**664**		**575**		**505**		**435**		**365**		**365**		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7922	7922	148,924,820,000	8322	216,507,097,018	8622	256,652,331,562	8622	301,998,744,857	8982	347,763,677,742	8982	1,271,846,671,179	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
1	3	17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	60,23	62,23	258,960,950,000	65,23	223,724,000,251	67,23	265,207,409,281	71,23	312,065,369,686	75,23	359,355,800,334	75,23	1,419,313,529,552	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
			Sasaran 21 : Menurunnya kawasan kumuh	**Luas Kawasan Kumuh (Ha)**	**673,42**	**620,06**		**533,56**		**459,56**		**409,56**		**359,56**		**359,56**		
1	4	15	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	51,722	46,722	47,055,350,000	41,722	209,290,193,784	36,722	248,097,253,843	31,722	291,932,120,029	26,722	336,171,555,151	26,722	1,132,546,472,807	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
			Sasaran 22 : Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	**Rasio elektrifikasi (%)**	**84,21**	**85,50**		**87,50**		**89,50**		**92,00**		**95,00**		**95,00**		
3	5	47	Program Diversifikasi & Konservasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,13	3,38	-	3,63	47,692,828,000	4,13	47,692,828,000	4,63	47,692,828,000	5,13	47,692,828,000	5,13	190,771,312,000	DESDM
3	5	37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945,607	965,607	1,723,350,000	989,607	11,000,000,000	1.018.607	11,000,000,000	1.041.607	11,000,000,000	1.078.607	11,000,000,000	1.078.607	45,723,350,000	DESDM

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Misi 4 ; BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN															
			Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup															
			Sasaran 23 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	**Persentase penurunan emisi dari BAU (%)**	**7.2**	**26.3**		**26.89**		**27.75**		**28.5**		**29.33**		**29.33**		
2	5	59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	417	500	-	550	4,600,000,000	600	4,704,699,000	640	4,800,000,000	670	4,800,000,000	670	18,904,699,000	DLH
2	5	26	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemar sedang (8)	0	0	Tercemar sedang (8)	5,765,090,000	Tercemar sedang (8)	3,865,980,000	Tercemar sedang (8)	4,000,000,000	Tercemar sedang (8)	4,000,000,000	Tercemar sedang (8)	17,631,070,000	DLH
			Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	**Indeks Resiko Bencana**	**0**	**145**		**140**		**135**		**130**		**125**		**125**		
1	5	51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	60 Persen	225,000,000	25 Persen	1,225,000,000	50 Persen	1,325,000,000	75 Persen	1,275,000,000	100 Persen	1,274,000,000	100 Persen	5,324,000,000	BPBD
1	5	49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85 Persen	87 Persen	355,020,000	88 Persen	1,785,920,000	89 Persen	1,785,920,000	90 Persen	1,785,920,000	91 Persen	1,785,920,000	91 Persen	7,498,700,000	BPBD

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sasaran 25 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	**Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)**	**73,18**	**66,68**		**69,01**		**75,09**		**80,09**		**83,09**		**83,09**		
1	3	70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/ Kota (%)	63,19	64,87	6,297,172,500	75,34	21,650,709,702	77,19	25,665,233,156	90	30,199,834,486	96,82	34,776,367,774	96,82	118,589,317,618	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
			Misi 5 ; BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK															
			Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik															
			Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**77,49**	**77,50**		**78,00**		**78,50**		**79,00**		**80,00**		**80,00**		
4	1	60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	71,05	73	2,974,660,000	75	2,547,303,400	77	2,198,578,969	79	1,832,418,318	81	1,447,949,632	81	11,000,910,319	Biro Organisasi (SETDA)
4	1	80	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	86	87	1,145,920,000	90	1,203,216,000	92	1,263,376,800	95	1,326,545,640	97	1,392,872,923	97	6,331,931,363	Biro Organisasi (SETDA)

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	3	48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	78,53	80	7.085.850.000	85	8.585.850.000	90	7,385,850,000	95	8.585.850.000	100	8.585.850.000	100	6,000,000,000	Bappeda
			Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	**Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**80,56**	**81**		**81,50**		**82**		**82,50**		**83**		**83**		
4	1	42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	49	50	906,920,000	61	952,266,000	71	999,879,300	79	1,049,873,265	89	1,102,366,929	89	5,011,305,494	Biro Organisasi (SETDA)
4	1	81	Program Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/ aturan (%)	52,63	60,53	224,960,000	68.42	236,208,000	78.95	248,018,400	89.47	260,419,320	92	273,440,286	92	1,243,046,006	Biro Organisasi (SETDA)
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2,6	2,143,730,000	2,8	3,601,000,000	3	3,571,000,000	3,2	3,731,000,000	3,5	3,991,000,000	3,5	17,037,730,000	Diskominfo

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	**Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda**	**Level 2**	**Level 3**		**Level 3**		**Level 3**		**Level 3**		**Level 4**		**Level 4**		
4	2	99	Pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	60	65	2,322,305,000	70	2,522,305,000	75	2,522,305,000	80	2,522,305,000	85	2,522,305,000	85	12,411,525,000	Inspektorat
4	2	21	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level kapasitas APIP	2	3	2,767,000,000	3	2,767,000,000	3	2,767,000,000	3	2,767,000,000	4	2,767,000,000	4	13,835,000,000	Inspektorat